

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang langsung dibawah naungan undang-undang. Sebagai sebuah lembaga pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan hal demikian dilakukan untuk menciptakan *good governance*. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagaimana secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat, yang berbunyi:“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pada dasarnya, pemerintahan merupakan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan pemerintah tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. Oleh karena itu birokrasi publik atau aparat pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok POLRI secara umum berwenang diantaranya memberikan Surat Izin mengemudi kendaraan bermotor. Sebagai pelaksanaannya diserahkan kepada Kepolisian Resor atau disebut dengan POLRES wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Fungsi Satuan Lalu lintas.

Surat izin Mengemudi (SIM) Adalah bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaran bermotor.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009). SATPAS adalah singkatan dari kata Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Keberadaan SATPAS tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan SIM, tuntutan masyarakat terhadap pembuatan SIM agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat akan dapat tercapai. Karena pelayanan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kinerja yang baik.

Berdasarkan temuan di sentra pelayanan SIM di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur masih ditemukan beberapa petugas yang belum optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Disamping itu, kendala lain yaitu kurang menguasainya tugas dan tanggungjawab petugas di bagian unit atau kelompok kerja (Pokja). Dengan demikian kinerja SATPAS di jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur tidak optimal. Kinerja merupakan hasil kerja seara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017: 67).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan dapat memberikan pengaruh penting bagi petugas SATPAS, karena dengan adanya rotasi jabatan dapat mengurangi kejenuhan dalam bekerja, kemudian rotasi juga dapat menambah pengalaman kerja karyawan, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam bekerja (Rivai dan

Sagala, 2010: 200-201). Anggota yang beberapa kali mengalami rotasi jabatan akan memiliki banyak pengalamandalam bekerja. Namun, tidak demikian dengan anggota yang baru pertama kali mengalami rotasi. Mereka akan mendapatkan kendala dan merasa kebingungan dalam memulai pekerjaannya. Termasuk pada SATPAS Se-Priangan Timur. Anggota yang baru ditempatkan pada SATPAS akan mulai melakukan adaptasi dan mempelajari *role play* dalam pelayanan SIM.

Berdasarkan temuan pada beberapa anggota yang mengalami rotasi, mereka merasakan hal yang sama. Oleh karenanya, berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa rotasi jabatan mengakibatkan munculnya kesenjangan diantara anggota yang telah lama melakukan rotasi dan anggota yang baru mengalami rotasi. Kesenjangan yang terjadi tentu akan memengaruhi terhadap kinerja. Disamping itu, faktor lain yang dapat terjadi adalah hambatan bagi petugas, yaitu mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada pekerjaan baru yang ditempatinya, kemudian mereka juga harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja barunya (Rivai dan Sagala, 2010: 200 – 201).

Bagi anggota yang baru mendapatkan rotasi jabatan tentunya akanmelakukan adaptasi dengan pekerjaan barunya. Hal demikian yang menyebabkan mereka akan mempelajari segala hal tentang posisi barunya. Dengan demikian, kemampuan anggota tersebut belum sepenuhnya menguasai/kompeten dengan posisi barunya. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh tuntutan pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012: 86).

Disamping itu, kinerja anggota juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya

penerapan disiplin yang diberlakukan, masih ditemukannya oknum anggota yang melakukan pelanggaran pungutan liar. Hal demikian merupakan salah satu indisiplier bagi anggota polri, khususnya pada SATPAS di jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur. Lebih lanjut lagi, disiplin kerja merupakan usaha mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disetujui bersama dalam melaksanakan kegiatan agar pembinaan hukuman pada seseorang atau kelompok dihindari (Hartatik, 2014: 197).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka penelitian ini berjudul “Rotasi jabatan, kompetensi dan disiplin kerja sebagai determinan kinerja pegawai (Survey pada SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran rotasi jabatan, kompetensi, disiplin dan kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
2. Bagaimana pengaruh rotasi jabatan terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur
3. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
4. Bagaimana pengaruh disiplin terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;

5. Bagaimana pengaruh rotasi jabatan, kompetensi dan disiplin terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagaiberikut:

1. Mengetahui bagaimana gambaran rotasi jabatan, kompetensi, disiplin dan kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh rotasi jabatan terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh disiplin terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur;
5. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh rotasi jabatan, kompetensi dan disiplin terhadap kinerja SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai rotasi jabatan, kompetensi, disiplin dan kinerja ini diharapkan berguna baik itu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang keilmuan sumber daya manusia. Disamping itu, meningkatkan budaya literasi civitas akademik di lingkungan Universitas Siliwangi pada khususnya dan pembaca lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ditujukan bagi instansi polri khususnya anggota SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur dalam meningkatkan kinerja. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan organisasi terutama pada bidang pelayanan SIM dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SATPAS di Jajaran Polda Jawa Barat Se-Priangan Timur.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret –Agustus 2021 adapun jadwal terlampir